

Persian Thought and Dynamics: A *Comparative Study* of Sayyed Hossein Nasr, Murtadha Muthahari, and Ali Shari'ati

Pemikiran dan Dinamika Persia : Studi Komparatif Sayyed Hossein Nasr, Murtadha Muthahari, dan Ali Syari'ati

Rizka Mulyana (*)^{1a}, Inayatillah^{2b}

^{1,2}Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Syiah Kuala, Banda Aceh

^{1a}rizkamulyana06@gmail.com

^{2b}inayatillah.ar@ar-raniry.ac.id

(*) Corresponding Author
rizkamulyana06@gmail.com
082296268590

How to Cite: Mulyana. R., Inayatillah (2026). Persian Thought and Dynamics: A *Comparative Study* of Sayyed Hossein Nasr, Murtadha Muthahari, and Ali Shari'ati. doi: 10.36526/js.v3i2.7934

Received : 28-04-2026
Revised : 19-06-2026
Accepted : 30-09-2026

Keywords:

Seyyed Hossein Nasr,
Murtadha Muthahhari,
Ali Shariati, *Comparative Study*, Persian Islamic Thought.

Abstract

This research aims to analyze and compare the thoughts of three prominent Persian Muslim intellectuals, Seyyed Hossein Nasr, Murtadha Muthahhari, and Ali Shari'ati, in responding to the challenges of modernity. Utilizing a qualitative method with a *Comparative Study* approach, this research examines literature such as books, journals, and relevant documents to identify the similarities and differences in the ideas of these three figures. The results indicate that Nasr emphasizes the spiritual crisis of modern man and proposes Sufism and traditional philosophy as solutions. Muthahhari focuses on the reconstruction of the political system through the concept of religious democracy based on justice and popular sovereignty under Divine law. Meanwhile, Ali Shari'ati presents Islam as a revolutionary ideology for social transformation to eliminate exploitation through the concepts of ummah and imamah. Despite their differing approaches (spiritual, socio-political, and revolutionary) all three agree that Islam serves as a fundamental answer to the multidimensional crisis caused by Western civilization.

PENDAHULUAN

Peradaban Barat modern dengan karakteristik rasionalistik, sekularistik, dan materialistik telah membawa dampak signifikan terhadap konstruk pemikiran Islam selama lebih dari dua abad terakhir. Di satu sisi, kemajuan teknologi memberikan kemakmuran materi, namun di sisi lain, ia melahirkan krisis moral dan spiritual akibat hilangnya nilai-nilai transendental dari kehidupan manusia. Fenomena ini menyebabkan masyarakat modern terperangkap dalam sistem yang mekanis dan kehilangan integritas kemanusiaannya karena melupakan dimensi ketuhanan.

Kawasan Persia, khususnya Iran, telah melahirkan sejumlah tokoh pemikir Islam kontemporer yang memiliki kontribusi besar dalam merespons dinamika tersebut. Di antara tokoh-tokoh tersebut, Seyyed Hossein Nasr, Murtadha Muthahhari, dan Ali Syari'ati merupakan figur yang sangat berpengaruh dalam membentuk wacana pemikiran Islam modern. Ketiganya hidup dalam konteks sosial-politik yang relatif sama, yaitu masa transisi dan gejolak perubahan di Iran, namun memiliki latar belakang intelektual serta pendekatan yang berbeda dalam memahami dan merespons modernitas.

Seyyed Hossein Nasr memberikan pandangan bahwa, krisis-krisis eksistensial ataupun spiritual yang dialami oleh manusia adalah spiritual yang dialami oleh manusia bermula dari pemberontakan manusia modern kepada Tuhan (Mumtaz, 2014). Muthahhari mengemukakan bahwa salah satu prinsip ideologi Islam adalah persamaan derajat serta tidak adanya diskriminasi. Demokrasi yang dijalankan bertujuan menciptakan masyarakat yang adil dengan pertimbangan

rakyat akan menerima pemerintah sebagai bagian dari amanat yang diberikan oleh Allah (Chumaedi, 2018). Sedangkan Ali Syari'ati memandang Islam sebagai kekuatan dinamis yang harus mampu membebaskan masyarakat dari belenggu diskriminasi dan kelas sosial melalui gerakan revolusioner.

Meskipun memiliki perbedaan pendekatan, ketiga tokoh tersebut memiliki kesamaan dalam melihat pentingnya peran Islam sebagai solusi terhadap krisis yang ditimbulkan oleh modernitas. Perbedaan tersebut justru menunjukkan kekayaan dan keragaman pemikiran dalam tradisi intelektual Islam kontemporer. Oleh karena itu, kajian komparatif terhadap pemikiran Seyyed Hossein Nasr, Murtadha Muthahhari, dan Ali Syari'ati menjadi penting untuk memahami berbagai perspektif dalam merespons modernitas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pemikiran ketiga tokoh tersebut guna mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam gagasan mereka. Dengan menggunakan metode studi komparatif dan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian pemikiran Islam kontemporer serta menjadi referensi dalam memahami dinamika hubungan antara Islam dan modernitas.

METODE

Penelitian yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah Studi Komparatif. Studi komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variable atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda (Sugiyono, 2012). Oleh karena itu, penggunaan studi komparatif dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan antara pemikiran tiga tokoh pada masa Persia. Studi Komparatif (*Comparative Study*) atau Studi Kausal Komparatif (*Causal Comparative Study*) merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variable tertentu. Tujuan penelitian komparatif adalah untuk melihat perbedaan dua atau lebih situasi, peristiwa, kegiatan, atau program yang sejenis atau hampir sama yang melibatkan semua unsur atau komponennya.

Menurut Bernadib yang dimaksud dengan studi komparatif adalah usaha untuk menemukan kesamaan dan perbedaan dari data atau fakta tertentu. Studi komparatif dalam bahasan ini dilakukan dalam rangka melihat bagaimana konsep pemikiran Islam Kawasan Persia menurut Sayyed Hossein Nasr, Murtadha Muthahhari, dan Ali Syari'ati, sehingga dapat melihat perbedaan dan persamaan dari pemikiran tokoh diatas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata maupun bahasa (Meleong, 2013).

Maka sumber data ini bersifat kepustakaan atau berasal dari berbagai literature diantaranya adalah buku, jurnal, surat kabar, dokumen pribadi dan lain sebagainya. Maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam penelitian ini menggunakan penelitian yaitu studi komparatif yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yang membandingkan keberadaan satu variable atau lebih dan tidak hanya dalam kegiatan membaca dan mencatat data yang dikumpulkan, tetapi peneliti bisa mengumpulkan ke tahap-tahap penelitian kepustakaan dengan analisa atau menelaah buku-buku, literature, catatan dan laporan terdahulu yang berkaitan dengan pemikiran dari ketiga tokoh yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemikiran Seyyed Hossein Nasr

Seyyed Hossein Nasr adalah seorang intelektual, filosof, dan tradisionalis yang muncul di era modern. Ia lahir di Teheran pada 7 April 1933. Ayahnya adalah seorang dokter dan pendidik yang sangat fanatik terhadap kebudayaan Iran serta tidak mudah terpengaruh oleh kebudayaan luar. Ayahnya menyadari bahwa tantangan bagi kaum tradisionalis datang dari dunia modern (Ahmad, 2025).

Sayyed Hossein Nasr adalah salah seorang di antara sekian pemikir muslim kontemporer yang paling terkemuka pada tingkat internasional dan banyak memberikan perhatian serta kritik yang tajam terhadap masalah-masalah yang dihadapi manusia modern (Aminrazavi, 1993). Pada akhirnya Nasr menjadi pengkritik barat yang paling kritis sejak ia menuangkan gagasannya tentang barat semasa di Harvard. Dalam ranah pemikirannya, Nasr menjelma menjadi seorang yang menawarkan gagasan Islam kepada Barat dan memberitahukan kepada dunia Timur bahwa Barat sedang berada dalam fase kehampaan spiritual. Titik utama yang menjadi bangunan dasar pemikiran Nasr adalah problem krisis manusia yang melupakan dimensi ketuhanan. Relasi antara Tuhan dan manusia yang coba ditegaskan oleh Nasr, menjadikan titik kritis dirinya terhadap kemajuan pengetahuan modern yang terjadi di Barat.

Bagi Nasr, modern bukan berarti kontemporer atau mengikuti zaman, bukan pula suatu yang berhasil menaklukkan atau mendominasi alam semesta. Sebaliknya, modern berarti sesuatu yang terpisah dari yang transenden dari prinsip-prinsip yang langgeng dalam realitas mengatur materi dan diberikan kepada manusia melalui wahyu dalam pengertian yang paling universal. Dengan demikian dipertentangkan dengan tradisi yang menurut Sayyed Hossein Nasr, bahwa tradisi mencakup tiga hal yaitu: *ad-din* sebagai agama yang meliputi semua aspek dan segala cabangnya, *as-sunnah* sebagai sesuatu yang sakral dan telah dan sudah menjadi keiasaan turun-temurun di kalangan masyarakat tradisional.

Yang terakhir adalah *as-silsilah* sebagai mata rantai yang mengaitkan masing-masing priode, episode atau tahap kehidupan dan pemikiran dalam dunia tradisional kepada sumber segala sesuatu (Latifa, 2019). Tradisi yang ditawarkan oleh Sayyed Hossein Nasr ini merupakan versus paham modern yang melepaskan diri dari ilahi dan dari prinsip-prinsip abadi yang dalam realitasnya mengatur segala sesuatu. Inilah yang menjadi titik landasan dan dasar pemikiran yang ia bangun.

Modernisasi oleh Sayyed Hossein Nasr dikatakan bahwa selain membawa dampak positif juga membawa dampak negatif. Dampak ini bersumber dari penolakan terhadap hakekat ruh dan penyingkiran maknawiyah secara gradual dalam kehidupan manusia. Modernitas mencoba hidup dengan roti semata, berupaya membunuh tuhan dan menyatakan kebebasan dari kehidupan akhirat.

Hampir tidak ada lagi pokok perdebatan yang memancing gejolak rasa dan perdebatan dikalangan umat Islam dewasa ini selain relasi antara pemikiran Islam dengan dunia barat. Disadari atau tidak peradaban barat telah menggerogoti konstruk pemikiran Islam sehingga barangkali sudah lebih dari dua abad umat Islam hidup dalam bayang-bayang peradaban barat, banyak pihak yang merasa khawatir akan tercerabutnya nilai-nilai islam itu sendiri dari pemeluknya.

Peradaban barat telah menimbulkan multikrisis, baik krisis moral, spiritual, dan krisis kebudayaan yang dimungkinkan lebih disebabkan corak peradaban modern industrial yang dipercepat oleh globalisasi yang merupakan rangkaian dari kemajuan barat pasca renaissance pada abad ke-17 yang membawa nilai-nilai antroposentrisme dan humanisme sekuler. Paham yang serba mendewakan manusia dan kehidupan dunia yang sifatnya temporal. Hal ini secara faktual telah melahirkan tercerabutnya kebermaknaan dalam hidup manusia, akibat hilangnya nilai-nilai transendental agama dari kehidupan manusia.

Kehidupan yang dibangun oleh Barat selalu bersifat rasionalistik, sekularistik, kapitalistik dan empiristik. Karakteristik ini cenderung melepaskan diri dari pandangan keagamaan. Masyarakat Barat yang dikenal sebagai "the post industrial society" adalah suatu masyarakat yang mencapai tingkat kemakmuran materi dari seperangkat teknologi yang serba mekanis dan otomatis. Masyarakat modern telah berubah menjadi penyembah pengetahuan dan teknologi sehingga tanpa disadari integritas kemanusiaannya tereduksi dan terperangkap dalam pada jaringan sistem rasionalitas teknologi yang sangat tidak human. Bahkan mereka lupa tentang siapa mereka, untuk hidup dan kemana sesudahnya. Bagi Nasr apa yang menjadi kesalahan bagi dunia Timur di era modern ini adalah menjadikan Barat sebagai tolakukur dari sebuah kemajuan. Dunia

Timur cenderung menjadikan Barat sebagai sesuatu yang harus diikuti atau dicontoh, bukan dijadikan sebagai bahan case study untuk mengambil pelajaran dan hikmah (Faturahman, 2022).

Satu hal yang dianggap sebagai kegagalan peradaban modern yang paling fatal ialah percobaan manusia untuk hidup dan menapikan keberadaan Tuhan dan agama. Suatu hal yang tentu sangat bertentangan dengan fitrah manusia yang dalam hatinya memiliki potensi ilahiyah, dan pasti akan selalu membutuhkan sesuatu yang bersifat transenden yaitu Tuhan.

Dalam perspektif inilah Sayyed Hossein Nashr menawarkan pendekatan tradisionalnya dengan sufisme sebagai alternatif yang mampu memenuhi kebutuhan spiritual manusia modern. Alternatif yang ditawarkan oleh Sayyed Hossein Nashr dalam upaya pembebasan manusia modern lewat filsafat tradisional adalah sufisme. Menurutnya bahwa ajaran agama terbagi kepada dua kategori. Pertama yang berhubungan dengan aspek kesyari'ahan atau eksoteris dan yang kedua adalah aspek sufisme atau esoteris. Sufisme tidak akan bisa dipraktekkan tanpa terlebih dahulu mempraktekkan ajaran syari'ah dengan benar (Nashr, 1981). Artinya bahwa antara syari'ah dengan sufisme terdapat hubungan yang sangat erat.

Bagi Sayyed Hossein Nashr bahwa sufisme bagaikan jiwa yang menghidupkan tubuh dan merupakan jantung dari pewahyuan ilahi. Sufisme mampu meniupkan semangatnya ke dalam seluruh struktur Islam baik dalam manifestasi sosial maupun intelektual, bahkan sufisme sebagai institusi yang terorganisasi dalam matriks yang lebih besar mampu memainkan peran dalam struktur Masyarakat.

Pemikiran Sayyed Hossein Nashr yakni tentang tradisi Islam atau Islam tradisional di tengah modernitas merupakan kritik terhadap pola pikir modernitas yang mengagungkan rasionalitas dalam segala hal. Menurut Islam tradisional menurut pemikiran Sayyed Hossein Nashr bahwa pola pikir yang demikian akan membawa manusia kepada keterambangan dan tidak punya tujuan hingga menjadikan hidup manusia jauh dari kebahagiaan. Dari uraian di atas kelihatannya pendekatan filsafat tradisional yang ditawarkan Sayyed Hossein Nashr pada intinya menuntun manusia masa kini keluar dari kungkungan ketidakpedulian tempat dunia modern untuk menemukan dirinya.

B. Pemikiran Murtadha Muthahhari

Murtadha Muthahhari lahir pada tanggal 2 Februari 1919 di Fariman, Khurasan, Iran. Murtadha Muthahhari Adalah seorang filosof, ulama, sufi, teolog dan pemikir serta tokoh politik syiah kontemporer, Muthahhari juga salah seorang ideolog dan arsitek revolusi Islam Iran. Untuk mengetahui corak pemikiran Muthahhari, pertama-tama perlu untuk mengetahui berbagai persoalan yang dihadapi Muthahhari selama masa hidupnya, kemudian latar belakang sosial yang sedikit banyak juga turut memengaruhi corak pemikirannya.

Muthahhari bersama-sama dengan Khomeini berjuang menentang pemerintahan otoriter Pahlevi. Apa yang telah diperjuangkan oleh Muthahhari untuk Islam, khususnya di Iran, selama lebih dari 20 tahun telah menjadi angin segar yang memberikan harapan kepada masyarakat luas untuk membangkitkan kembali nilai, identitas, dan budaya Islam yang telah lama mengalami penyimpangan dan distorsi oleh pemerintahan yang otoriter. Pemerintahan otoriter membuat Teheran berada dalam masa yang menyedihkan sehingga memerlukan sebuah perubahan sosial secara besar-besaran.

Negara dalam Islam ialah bagian dari ciri-ciri sifat universal Islam di mana sistem pengaturannya berbentuk lembaga formal. Kata *baladun* dimaknai sebagai negara yang baik, dengan penduduk yang baik pula dan mendapat ampunan Allah. Pemikiran Murtadha Muthahhari tentang negara sangat dipengaruhi oleh sikap kritisnya terhadap sistem negara Iran di masa Syah Pahlevi yang sangat feodal dan otoriter. Rezim pemerintahan Iran di bawah kepemimpinan Syah Pahlevi yang sangat jauh dari nilai-nilai Islami memantik ulama dan pemikir Iran untuk melakukan revolusi kemudian menyusun suatu sistem dan bentuk negara yang berorientasi pada keadilan dengan didasarkan pada sistem pemerintahan Islam (Sabara, 2019).

Menurut Murtadha Muthahhari, negara merupakan lembaga yang di dalamnya terdapat ketergantungan antar sesama manusia untuk mewujudkan kedamaian dan harmoni. Berdasarkan

asumsi tersebut, Muthahhari memandang negara sebagai sebuah lembaga yang mengatur masyarakat untuk lebih memperjuangkan nilai-nilai demokrasi. Sistem pemerintah Islam merupakan solusi untuk mencapai nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya.

Berdasarkan pandangan dunia Tauhid, sistem pemerintahan Islam menempatkan kedaulatan rakyat yang terbatas di bawah kekuasaan Allah, karena tiap peraturan yang berlaku harus sesuai dengan prinsip dan syariat Islam. Terbentuknya pemerintahan dan pelaksanaannya harus sesuai kehendak rakyat. Pemerintah ialah wakil umat guna mengurus kepentingan agama dan dunia agar tak bertentangan dengan ajaran dalam Al-Quran dan Hadis (Chumaedi, 2018).

Menurut Murtadha Muthahhari, negara merupakan sebuah lembaga yang di dalamnya manusia saling bergantung satu sama lain guna merealisasikan harmoni dan kerukunan. Berdasarkan pandangan tersebut, beliau memandang negara merupakan sebuah organisasi yang mengatur tata kehidupan masyarakat untuk lebih memperjuangkan nilai-nilai demokrasi. Bagi Muthahhari demokrasi merupakan suatu hal yang sangat diminati oleh setiap individu meskipun demokrasi Islam berlainan dengan demokrasi Barat. Islam sendiri baru mengenal istilah demokrasi pada akhir abad ke-19 ketika negara-negara Islam sedang menghadapi kolonialisme, ditindas dan diperintah penguasa tiran.

Demokrasi adalah kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemahaman ini adalah pemahaman yang lumrah, akan tetapi yang bisa diterapkan dalam Islam tentunya yang sudah digabungkan dengan nilai-nilai Islam atau prinsip-prinsip Islam. Menurut Muthahhari, pemerintahan yang demokratis itu bisa terwujud jika ada pengakuan akan kesamaan martabat manusia yang memungkinkan Masyarakat menggunakan hak pilihnya. Muthahhari mengemukakan bahwa salah satu prinsip ideologi Islam adalah persamaan derajat serta tidak adanya tindakan diskriminasi.

Egalitarianisme kemudian menjadi basis bagi prinsip-prinsip selanjutnya, yaitu tegaknya keadilan dan terwujudnya kemaslahatan dan kesejahteraan bersama. Pada sisi yang lain dalam kehidupan bernegara, masyarakat ideal adalah masyarakat yang mampu mewujudkan masyarakat yang egaliter dan setara tanpa membedakan status sosial dan diskriminasi dengan alasan apa pun. Dengan demikian tidak ada seorang pun individu yang mendapatkan tindakan diskriminasi dalam bentuk apa pun hanya karena perbedaan status sosial maupun identitas lainnya.

Oleh karenanya, pedoman ideal dalam kehidupan bernegara yaitu melalui prinsip syura untuk menunjang terwujudnya kehidupan demokrasi. Guna merealisasikan iklim demokrasi dalam suatu negara, pemimpin memegang kunci peranan paling penting. Setiap masyarakat mengharapkan pemimpin yang adil. Sehingga dapat dipahami bahwa sistem demokrasi yang diusung oleh Muthahhari yaitu demokrasi religius, demokrasi ini menolak teori demokrasi Barat yang cenderung otoriter. Demokrasi religius menggabungkan prinsip-prinsip agama sebagai landasan ruh untuk menghasilkan produk hukum yang berperikemanusiaan terhadap rakyat yang beragama.

Berdasarkan pemahaman Muthahhari, manusia tetap memiliki peran untuk menentukan kedaulatan negaranya sendiri. Meskipun pemilik kedaulatan merupakan Tuhan semata, tetapi manusia memiliki peran yang nyata untuk melakukannya (Gunawan, 2025).

C. Pemikiran Ali Syari'ati

Ali syari'ati adalah salah seorang ideolog dan pemikir Revolusi Iran terkemuka. Ia dilahirkan di Mazinan, sebuah daerah dipinggiran kota Mashad dekat Sabzavar pada tahun 1933. Ayahnya Muhammad Taqi Syari'ati, seorang ulama yang terkenal di Iran adalah gurunya yang utama yang mendidiknya sendiri secara langsung sejak kecil. Ia menempuh sekolah dasar dan menengah di Mashad. Kemudian ia masuk *Teaching Training College*, sejenis sekolah tinggi keguruan. Disini pula ia memulai perjalanan hidupnya dalam perjuangan politik, sosial dan intelektual (Ramadhan, 2011).

Ali Syari'ati menjelaskan bahwa politik adalah pemerintah sistem pemerintah yang mempunyai tanggung jawab memelihara agar masyarakat bisa aman dan menyediakan sarana-

sarana kesejahteraan bagi warganya sebagai suatu tugas administrasi Negara. Karena pemikiran politik merupakan jenis pemikiran paling tinggi dalam negara. Ia adalah pemikiran yang berkaitan dengan pengaturan dan pemeliharaan urusan umat. Ini pulalah yang membuat hancurnya negara Islam khilafah di Turki yakni akibat dari lemahnya pemikiran politik para penguasa dan umatnya saat itu. Politik (siyasah) mempunyai makna mengatur urusan-urusan umat, baik dalam maupun luar negeri. Politik digunakan oleh negara maupun umat. Negara mengurus kepentingan umat, sementara umat melakukan koreksi terhadap pemerintah. Terlepas dari itu bahwa secara historis terdapat hubungan yang erat antara agama dan politik, ini memberikan gambaran bahwa Islam secara umum memang bergulat dengan masalah-masalah politik.

Bagi Ali Syari'ati Islam adalah agama yang revolusioner, bukan agama yang terlihat mandeg tidak bergerak. Karena dalam pengamatan Ali Syari'ati, Islam yang sekarang dalam perjalanan waktu telah berubah menjadi seperangkap doa-doa dan ritual yang tidak bermakna sama sekali dalam kehidupan. Ia melihat Islam hanya sebatas agama yang mengurus bagaimana orang mati, tetapi tidak peduli bagaimana orang bisa bertahan hidup ditengah gelombang diskriminasi, eksploitasi dan aneka penindasan dari penguasa yang zalim. Dan pada kenyataannya agama seperti inilah yang disukai oleh para penguasa untuk menjaga agar kekuasaannya tetap aman, tanpa ada gangguan dari orang-orang yang ingin mengamalkan Islam sejati.

Dari gambaran di atas mengertilah kita bagaimana pentingnya sebuah pemikiran politik dalam sebuah pemerintahan, khususnya dalam hal ini pemerintahan Islam. Serta perlunya penggerebekan pemikiran umat, agar tidak terlalu lama terdiam dan termangu melihat dan mengikuti aturan aturan penguasa yang zalim. Dalam karya Ali Syari'ati yang membicarakan tentang adanya sistem dalam pemerintahan Islam terdapat dalam bukunya yang berjudul *al-Ummah wa al-Imamah*. Dalam bukunya ini, secara garis besar dengan pendekatan sosiologis menunjukkan bahwa tidak bisa dipisahkan antara Ummah dan Imamah mulai dari segi bahasa hingga sosiologis (Syari'ati, 1989).

Setelah menunjukkan kedudukan Ummah sebagai kelompok manusia yang bergerak maju bersama-sama menuju satu tujuan kesempurnaan, Syari'ati menunjukkan keharusan adanya Imamah sebagai pembimbing proses ini. Infrastruktur dari ummah adalah struktur ekonomi, karena ekonomi merupakan kebutuhan mendasar dalam menjalani roda kehidupan dunia, prasyarat menuju kehidupan spiritual. Sistem sosial ummah didasarkan pada persamaan hak, keadilan, dan kepemilikan oleh manusia di atas sistem Habi, masyarakat yang menjunjung tinggi kesetaraan, persaudaraan, dan masyarakat tanpa kelas, inilah yang menjadi prinsip paling elementer dari ummah.

Pemikiran politik dan bentuk pemerintahan dari ummah bukanlah didasarkan demokrasi para pemimpin, bukan liberalism yang tidak bertanggung jawab dan tanpa memiliki arah yang dimanfaatkan untuk alat permainan dari kekuatan sosial yang saling bertentangan, bukan aristokrasi, bukan kediktatoran yang anti rakyat, dan bukan juga oligarki. Ummah sebaliknya, yakni meliputi kesucian kepemimpinan yang berkomitmen dan revolusioner, bertanggung jawab bagi gerakan dan pertumbuhan masyarakat atas dasar pandangan dan ideologi, serta bagi perwujudan nasib manusia Ilahi dalam suatu rencana penciptaan (Riyanto, 2021).

Sebagaimana halnya dengan istilah ummah, istilah imamah menampakkan diri dalam bentuk sikap sempurna, dimana seseorang dipilih sebagai kekuatan penstabilan dan pendinamisan massa. Penstabilan dalam konsep ini masalahnya adalah menguasai massa sehingga berada dalam stabilitas dan ketenangan, yang kemudian melindungi mereka dari ancaman, penyakit dan bahaya. Sedangkan pendinamisan dalam konsep ini masalahnya berkenaan dengan asas kemajuan dan perubahan ideologis, sosial dan keyakinan serta menggiring massa dan pemikiran mereka menuju bentuk ideal. Dengan demikian imamah bukanlah sebuah lembaga yang anggota-anggotanya menikmati kenyamanan dan kebahagiaan yang mapan, dan bukan pula lembaga yang melepaskan diri dari kepemimpinan dan tanggung jawab dari persoalan kesejahteraan umat.

Dasar-Dasar Pemerintahan Islam Menurut Ali Syari'ati :

1. Keadilan

Ada dua hal yang harus dipenuhi dalam dasar-dasar pemerintahan menurut Ali Syari'ati, dalam hal ini Syiah, yaitu: Keadilan dan Imamah. Lebih dari itu yang perlu diperhatikan adalah bahwa Negara Islam harus didasarkan kepada persetujuan dan kerja sama umat yang bersumber dari al-Quran dan al-Hadist. Merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menjamin tersedianya keperluan-keperluan dasar kehidupan, seperti: makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan prasarana kesehatan bagi setiap warga Negara tanpa membedakan ras dan agama untuk sementara waktu atau selamanya. Hal ini sebagaimana tujuan Negara Islam untuk memperbaiki keadaan umat dengan menegakkan keadilan, prinsip kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Dalam pandangan Ali Syari'ati keadilan merupakan fundamen yang sangat penting dalam masyarakat Islam.

Lantaran, seperti telah disebutkan, Allah bersifat adil dan penciptaan bertumpu diatas keadilan. Oleh sebab itu, sistem-sistem kehidupan haruslah juga didasarkan atasnya dan karena kenyataan ini, maka kediktatoran dan ketidakadilan dalam pemerintahan adalah sistem-sistem anti Tuhan yang tidak alamiah, yang mesti ditumbangkan dan dihancurkan (Syari'ati, 1989). Dalam pengamatan Syari'ati Iran yang berada dalam keterpurukan identitas nasional dan disparitas (kesenjangan) sosial ekonomi yang sangat lebar. Sehingga membutuhkan dua bentuk revolusi yang saling berkaitan. Pertama revolusi nasional, yang bertujuan bukan hanya untuk mengakhiri seluruh bentuk dominasi Barat, tetapi juga untuk merevitalisasi kebudayaan dan identitas nasional negara Dunia Ketiga bersangkutan. Kedua, revolusi sosial untuk menghapuskan semua bentuk eksploitasi dan kemiskinan guna menciptakan masyarakat yang adil, dinamis dan "tanpa kelas" (classes).

2. Imamah

Imamah dalam pandangan Ali Syari'ati memiliki arti penting sebagai dasar dari pemerintahan Islam. Dalam banyak tulisannya ia menekankan bahwa tegak berdirinya sebuah pemerintahan tergantung kepada imam. Sebab dalam ajaran syi'ah ada suatu keyakinan akan adanya imam al-Ashr atau imam sepanjang zaman (imam of the Age) yang akan melakukan revolusi pemikiran dan gerakan.

Imamah sendiri menurut Ali Syar'ati adalah kepemimpinan progresif dan revolusioner yang bertentangan dengan rezim-rezim politik guna membimbing manusia serta membangun masyarakat diatas fondasi yang benar dan kuat, yang bakal mengarahkan menuju manusia kesadaran, pertumbuhan dan kemandirian dalam mengambil keputusan. Keberadaan seorang imam akan terus dibutuhkan oleh manusia sampai kapanpun.

Jadi, dasar pemerintahan Islam menurut Ali Syari'ati ada 2 (dua) hal yaitu keadilan dan imamah. Keadilan dalam pandangan Ali Syari'ati adalah sebuah fundamen yang sangat penting. Salah satu pendorong gerakan sejarah kearah masyarakat yang paling sejalan dengan keadilan dan persamaan adalah Syiah, karena dalam Syiah terdapat dua prinsip yang menggerakkan umat pada pembebasan sampai melahirkan keadilan. Kedua prinsip itu adalah imamah dan keadilan. Keadilan bagi Syiah diletakkan pada kedudukan yang lebih tinggi sebagai prinsip teologis. Bentuk keadilan yang dimaksudkan disini seperti tidak ada perbedaan antara yang kaya dan miskin, penguasa dan rakyat biasa. Yang paling penting tidak ada penindasan bagi yang lemah (Faizal, 2022).

D. Komparasi Pemikiran Tiga Tokoh Persia

Pemikiran Seyyed Hossein Nasr, Murtadha Muthahhari, dan Ali Syari'ati menunjukkan corak yang berbeda namun memiliki titik temu dalam merespons tantangan modernitas. Seyyed Hossein Nasr menempatkan kritiknya pada krisis spiritual manusia modern akibat dominasi rasionalitas dan sekularisme Barat. Ia menilai bahwa modernitas telah memisahkan manusia dari dimensi transenden, sehingga solusi yang ditawarkan adalah kembali kepada tradisi Islam melalui pendekatan sufisme sebagai inti spiritualitas. Nasr juga menyatakan bahwa dimensi batiniah yang dimiliki islam harus diperkenalkan sebagai jalan alternative yaitu dengan ajaran tasawuf (Sanusi,

2020). Dengan demikian, pemikiran Nasr lebih bersifat filosofis dan metafisik yang menekankan pentingnya hubungan manusia dengan Tuhan.

Berbeda dengan Nasr, Murtadha Muthahhari lebih menekankan pada aspek sosial-politik, khususnya dalam konsep negara dan demokrasi Islam. Ia mengembangkan gagasan demokrasi religius, yaitu sistem pemerintahan yang mengakui kedaulatan rakyat namun tetap berada dalam kerangka hukum Ilahi. Dalam pandangannya, prinsip egalitarianisme, keadilan, dan musyawarah (syura) menjadi dasar utama dalam membangun masyarakat yang harmonis. Muthahhari berupaya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan sistem politik modern tanpa menghilangkan esensi ajaran agama.

Sementara itu, Ali Syari'ati menawarkan pendekatan yang lebih revolusioner dengan menempatkan Islam sebagai ideologi pembebasan. Ia mengkritik keras praktik keagamaan yang bersifat ritualistik dan tidak responsif terhadap ketidakadilan sosial. Melalui konsep ummah dan imamah, Syari'ati menekankan pentingnya kepemimpinan ideologis yang mampu menggerakkan masyarakat menuju perubahan sosial. Ia juga menyoroti pentingnya keadilan sebagai fondasi utama dalam sistem pemerintahan Islam, serta mendorong terbentuknya masyarakat tanpa kelas yang bebas dari eksploitasi dan penindasan. Pemikiran Ali Syari'ati menciptakan gerakan, membangun, dan melahirkan kekuatan sosial serta memberikan misi, komitmen, dan tanggung jawab kepada seseorang (Mashadi, 2021).

Meskipun memiliki perbedaan pendekatan, ketiga tokoh tersebut memiliki kesamaan dalam mengkritik dominasi peradaban Barat serta menegaskan bahwa Islam merupakan solusi atas krisis manusia modern. Nasr menekankan aspek spiritual, Muthahhari pada sistem politik yang adil dan demokratis, sedangkan Syari'ati pada transformasi sosial yang revolusioner. Perbedaan ini menunjukkan adanya keragaman pendekatan dalam pemikiran Islam kontemporer, yang masing-masing menawarkan solusi sesuai dengan konteks dan permasalahan yang dihadapi masyarakat.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis komparatif, dapat disimpulkan bahwa Seyyed Hossein Nasr, Murtadha Muthahhari, dan Ali Syari'ati memiliki kesamaan dalam mengkritik dampak negatif modernitas Barat, khususnya dalam hal sekularisasi dan krisis spiritual manusia. Namun demikian, ketiganya menawarkan pendekatan yang berbeda dalam memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Seyyed Hossein Nasr menekankan pentingnya kembali kepada tradisi dan dimensi spiritual Islam melalui pendekatan sufisme sebagai solusi atas krisis modernitas. Murtadha Muthahhari mengusung konsep demokrasi religius yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan sistem pemerintahan modern guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Ali Syari'ati menempatkan Islam sebagai kekuatan revolusioner yang bertujuan untuk membebaskan masyarakat dari penindasan dan menciptakan tatanan sosial yang adil. Dengan demikian, perbedaan pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pemikiran Islam kontemporer bersifat dinamis dan kontekstual, serta mampu menawarkan berbagai alternatif solusi dalam menghadapi tantangan modernitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminrazavi, M., & Moris, Z. (1994). *The complete bibliography of Seyyed Hossein Nasr from 1958 through 1993*. Kuala Lumpur.
- Chumaedi, A. (2018). Pemikiran Murtadha Muthahhari tentang negara dan masyarakat serta pandangannya terhadap revolusi Islam Iran. *Journal of Government and Civil Society*, 2(1).
- Faizal, L. (2022). Telaah pemikiran Ali Syariati tentang pemerintahan Islam kontemporer. *Jurnal Tapis*, 18(1).
- Faturohman, A. R. (2022). Krisis modernitas dan sains dalam pandangan Seyyed Hossein Nasr. *Jurnal Riset Agama*, 2(3), 734–750.

- Gunawan, D. (2025). Konsep kedaulatan dalam sistem demokrasi menurut Murtadha Muthahhari. *Journal of Islamic and Social Studies (JISS)*, 3(2).
- Irawan Riyanto, P. (2021). Agama dan perubahan sosial perspektif Ali Syariati. *JAWI*, 4(2).
- Latifa, S. (2019). Tradisi Islam di tengah modernitas: Filsafat perenial (telaah atas pemikiran Seyyed Hossein Nasr). *Al-Hadi*, 5(1).
- Meleong, L. J. (2013). Metode penelitian kualitatif. PT Grafindo Persada.
- Mumtaz, N. M. (2014). Hakikat pemikiran Sayyed Hossein Nasr. *Indo-Islamika*, 4(2).
- Ramadhan, M. (2011). Teologi kemanusiaan: Studi atas pemikiran Ali Syariati. *Teologia*, 22(2).
- Sabara. (2019). Konsep masyarakat dan negara tauhidi dalam pemikiran politik Murtadha Muthahhari. *Jurnal Politik Profetik*, 7(2).
- Sanusi, A. (2020). Sejarah pemikiran Muslim kontemporer. CV Elsi Pro.
- Sugiyono. (2012). Metode penelitian pendidikan. Alfabeta.
- Syari'ati, A. (1981). *Islamic life and thought*. Allen and Unwin.
- Syari'ati, A. (1989). *Al-ummah wa al-imamah*. Mu'assasah Al-Kitab Al-Tsaqafiyah. (Terjemahan A. Muhammad, Ummah dan imamah, Pustaka Hidayah, 1989).
- Syari'ati, A. (n.d.). *Membangun masa depan Islam: Pesan untuk para intelektual Muslim* (R. Astuti, Trans.).